

FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Zolla Maretia Putri
zollamaretia@gmail.com
Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze and examine the effect of Flypaper of Local Owned-source Revenue and balance fund on the Local expenditure of East Java province. The population was local government of East Java province. While, the sample was 38 district or cities of East Java province. Moreover, the data were secondary, which in the form of budget realization statement. Meanwhile, this data were taken from Financial Management and Local Asset Department of East Java province. Furthermore, the observation period was in 2016-2018. In addition, the data analysis technique used multiple linier regerssion. The research result concluded Local Owned-source Revenue and General Allocation Fund had positive effect on the local expenditure of East Java province. Likewise, Special Allocation Fund as well as share fund had positive effect on the local expenditure of East Java province. In addition, Flypaper Effect was occurred at districts or cities of East Java province during 2016-2018.

Keywords: Flypaper, Local Owned-source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Share Fund, Local Expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh *Flyaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan sampel dari penelitian ini sebesar 38 Kabupaten/Kota. Periode pengamatan sampel yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *full sampling*, yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Serta *Flypaper Effect* terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 sampai dengan 2018.

Kata kunci: *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan kewenangan, keleluasan dan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui suatu upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranan masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Otonomi daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pemberdayaan daerah untuk melaksanakan pemerintahannya secara mandiri. Prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan tidak bergantung pada pemerintah pusat (Liando, 2017). Kebijakan otonomi daerah dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan suatu daerah yang pada akhirnya akan kembali ke daerah itu sendiri. Dengan ini, maju dan tidaknya suatu daerah dapat ditentukan melalui kemampuan serta kemauan dalam melaksanakan otonomi daerah.

Intani (2018) menyatakan bahwa tujuan pemerintah daerah adalah untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, terealisasinya pembangunan dalam suatu daerah, tercapainya standar pelayanan minimum kepada masyarakat berupa tersedianya fasilitas sarana dan prasarana publik sesuai dengan kebutuhan daerah, serta memberi kemudahan masyarakat dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin pesat pembangunan daerah maka membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar juga. Maka dengan itu, pemerintah daerah diharapkan agar mampu menciptakan inovasi-inovasi dalam menggali sumber keuangan khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah melalui pendapatan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan penerimaan yang diperoleh dengan baik untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Kemandirian suatu daerah yang merupakan cerminan dari otonomi daerah dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah tersebut. Besar kecilnya pendapatan asli daerah juga akan menentukan apakah suatu daerah telah mandiri atau tidak. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator yang memiliki peranan penting dalam mengukur kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian suatu daerah (Ariwibowo, 2015). Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi daerah dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan daerah. Pendapatan yang berbeda pada daerah-daerah menjadi permasalahan yang dihadapi. Daerah dengan kemajuan dibidang industrinya dan kaya akan sumber alam yang melimpah cenderung menghasilkan PAD yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya terbatas dan tingkat industri yang rendah. Hal ini mengharuskan pemerintah pusat untuk melakukan kegiatan tranfer yang dialokasikan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing (Sari, 2017). Pemerintah pusat memberikan transfer berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH sebagai bentuk tambahan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Pemerintah pusat mengharapkan pemerintah daerah dapat mengelola transfer dana tersebut secara efektif dan efisien. Besarnya jumlah transfer dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan seharusnya dapat dijadikan insentif oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Namun, kenyataannya yang terjadi adalah dana dari pemerintah pusat justru dijadikan sebagai sumber penerimaan daerah yang utama daripada PADnya sendiri sehingga mengakibatkan ketidakefektifan dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Hambatan otonomi daerah muncul ketika respon dari pemerintah daerah lebih besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dalam pengeluaran belanja daerah tanpa berusaha memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki daerah itu sendiri yang mana selanjutnya dikenal dengan istilah *Flypaper effect* (Sasana, 2010).

Oktavia (2014) mengatakan *Flypaper effect* merupakan suatu fenomena ketika pemerintah daerah merespon berbeda (lebih boros) dalam menentukan belanja daerahnya dengan didasarkan pada transfer/*grants* daripada pendapatan asli yang dimiliki daerahnya sendiri. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi yang lebih luas dimana transfer akan meningkatkan belanja pada suatu daerah menjadi lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri serta kecenderungan untuk menunggu bantuan yang diberikan pusat dibandingkan mengelola sumber daya pada daerah itu sendiri. Akibatnya, disaat alokasi dana transfer dari pemerintah pusat yang diperoleh daerah tersebut besar menjadikan pemerintah

daerah berupaya pada periode-periode berikutnya pemerintah daerah memperoleh alokasi dana secara tetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Armawaddin *et al.* (2017) tentang *Flypaper Effect* yang memberikan hasil bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* dan penelitian lain juga dilakukan oleh Ekawarna (2017) tetapi ternyata menyimpulkan hal yang berbeda yaitu tidak terjadinya *Flypaper Effect* pada belanja daerah, baik pada kabupaten/kota induk maupun kabupaten/kota pemekaran di Provinsi Jambi. Penelitian oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) yang memberikan hasil PAD, DAU, DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah sedangkan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah namun tidak signifikan dan penelitian Asriati (2017) yang memberikan hasil PAD, DAU, DAK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *flypaper effect* pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di provinsi jawa timur tahun 2016 sampai dengan 2018.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori Stewardship mempunyai akar psikologis dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson dan Davis, 1991). Dalam teori stewardship dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika seorang manajer tidak berfokus pada kepentingan individu, tetapi akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama sehingga lebih mengupayakan kepentingan dan keinginan prinsipal serta mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas yang tinggi dan kejujuran terhadap pihak lain. Ketika kepentingan steward dan pemilik berbeda, maka steward akan berusaha untuk melakukan kerjasama dengan prinsipal daripada menentangnya, karena steward memiliki pandangan dalam berupaya untuk mewujudkan tujuan berorganisasi dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan sehingga fungsi utilitis dapat tercapai secara maksimal (Raharjo, 2007).

Ramadhan (2018) mengatakan bahwa Indonesia dalam masa otonomi daerah, memandang pemerintah sebagai *stewardship* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal* yang merupakan pemilik sumber daya. Pada konteks ini terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*stewardship*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan dalam organisasi. Organisasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempertanggungjawabkannya kepada publik. Sehingga dapat diterapkan dalam konteks organisasi sektor publik dengan menggunakan teori stewardship.

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam pengaturan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan akan kebutuhan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah secara efektif baru diberlakukan serentak mulai 1 Januari 2001. Otonomi daerah tersebut merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan pelayanan kepada seluruh rakyat agar lebih meningkat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan, keadilan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah (Oktavia, 2014).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang

dianggarkan oleh pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam periode 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan oleh Daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, pengawasan, perencanaan, distribusi, alokasi dan stabilisasi (PP No. 12 Tahun 2019).

Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan pengertian Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah dimana daerah tidak perlu menerima pembayarannya kembali dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berkenaan. Belanja Daerah diklasifikasikan yang terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.

Menurut Darise (2008:138) belanja pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diklasifikasikan berdasarkan kelompok belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan kelompok belanja langsung terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah sebagai bentuk dalam perwujudan desentralisasi.

Sumber pendapatan asli daerah berasal dari empat jenis pendapatan yaitu: 1) Pajak Daerah, merupakan kontribusi wajib oleh masyarakat yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, 2) Retribusi Daerah, merupakan pungutan dari daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus tersedia dan/atau pemberian oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan atau orang pribadi, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil penyertaan modal daerah, 4) Lain-Lain PAD yang sah, merupakan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan ditetapkan setiap tahun anggaran yang dialokasikan kepada daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan agar kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan juga antar-pemerintah daerah menjadi berkurang. Dana Perimbangan

terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari penerimaan Pajak dan SDA dimana transfer tersebut digunakan untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut dengan DAU adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Umum diciptakan dalam mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Yani, 2002:142). Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Daerah dengan kemampuan potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Namun sebaliknya daerah dengan kemampuan potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar (Masdjojo dan Sukartono, 2009).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Handayani dan Nuraina (2012), Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN yang digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat dengan DAK adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dalam rangka untuk membantu daerah tertentu dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu daerah. DAK membantu membiayai kegiatan yang khususnya untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong peningkatan pembangunan daerah. Pelayanan dasar masyarakat meliputi pendidikan, infrastruktur dan prasarana pemerintah daerah (Darise, 2008:137). Daerah yang memperoleh DAK adalah daerah yang harus berdasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan anggaran yang berasal dari pendapatan APBN dan pengalokasiannya kepada Daerah didasarkan pada angka persentase untuk membiayai kebutuhan yang menjadi kepentingan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang terbagi menjadi Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam).

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak yaitu terdiri atas pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan DBH non pajak atau sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

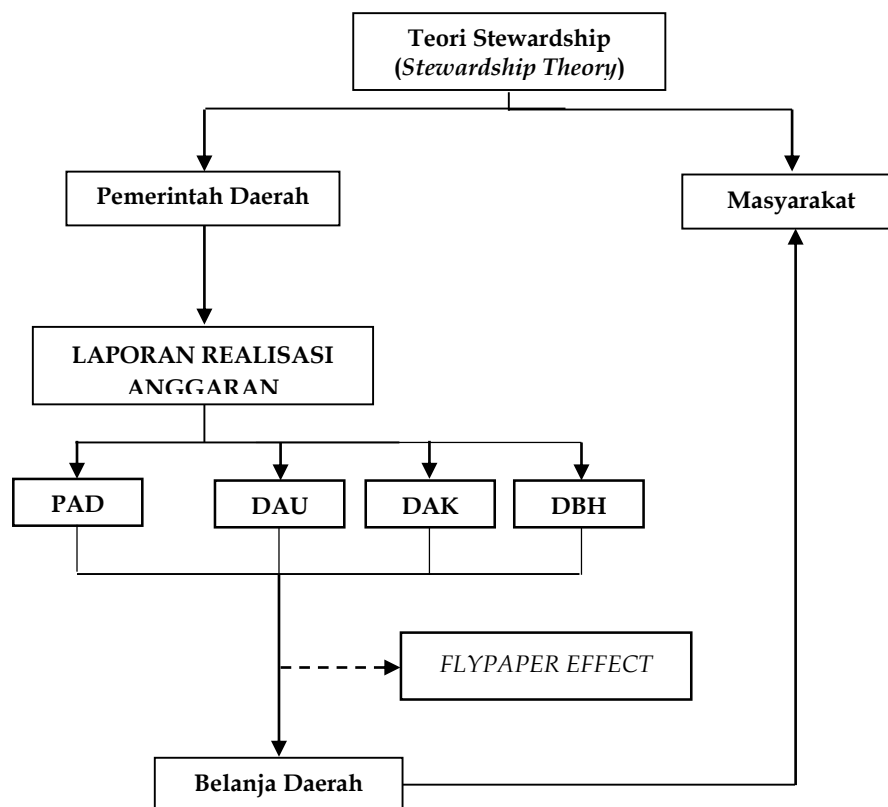
Flypaper Effect

Menurut Oates (1999) *Flypaper Effect* adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat suatu daerah merespon belanja lebih besar terhadap dana transfer daripada pendapatan asli daerahnya sendiri. Turnbull (1998) menyampaikan bahwa indikasi peningkatan belanja yang tinggi tersebut disebabkan oleh adanya inefisiensi pada belanja pemerintah daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Dengan kata lain, gejala *flypaper effect* memperlihatkan apabila adanya peningkatan alokasi transfer maka akan diikuti oleh pertumbuhan belanja yang lebih tinggi (dalam Purnomo, 2011).

Flypaper Effect merupakan respon yang asimetris terhadap peningkatan penggunaan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang disebabkan oleh ketergantungan pemerintah daerah yang lebih tinggi terhadap alokasi dana perimbangan tersebut dalam membiayai belanja daerah. Ketika pemerintah daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak bersumber dari transfer/grants (DAU, DAK dan DBH) dibandingkan dari pendapatan asli dari daerahnya (PAD) sehingga dapat berakibat pemborosan dalam belanja daerah, maka hal itu menyebabkan terjadinya fenomena *flypaper effect* (Ekawarna, 2017).

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran akan digambarkan sebagai berikut sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dan termasuk elemen yang sangat penting bagi suatu daerah dalam mencukupi kebutuhan belanja daerahnya dan menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintah di suatu

daerah. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka Belanja Daerah akan ikut meningkat. Secara umum, semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya sendiri sehingga menunjukkan kinerja keuangan yang positif dalam daerah tersebut. Dalam hal ini penilaian kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan telah mampu melaksanakan otonomi daerah (Hamdani, 2014). Dari penelitian Sasana (2010) dan Asriati (2017) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hamdani (2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah dengan presentase besar dan berasal dari daerah sendiri yang akan digunakan dalam pembiayaan daerah oleh sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan bersumber dari pendapatan APBN yang bersifat *unconditional grants* (transfer tak bersyarat). Dana Alokasi Umum sebagai salah satu sumber penerimaan utama yang digunakan daerah untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah selain dana perimbangan lainnya. Semakin besar DAU yang diperoleh suatu daerah maka daerah tersebut masih bergantung kepada pemerintah pusat. Distribusi DAU akan lebih besar diberikan kepada daerah dengan kemampuan yang relatif kecil dan sebaliknya. Pemerintah daerah pun harus mampu sebaik mungkin dalam melakukan pengelolaan dana tersebut demi pembiayaan pengeluaran daerah. Dengan pemanfaatan DAU yang optimal dan sesuai dengan sasaran akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja daerah (Asriati, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2014) dan Liando (2017) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dimaksudkan untuk membantu daerah tertentu dalam membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mempercepat pembangunan daerah (Darise, 2008:137). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Armawaddin *et al.* (2017) memberikan hasil bahwa baik dengan menggunakan model regresi parsial maupun berganda DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi tahun 2016-2017.

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) ialah dana yang diperoleh melalui perhitungan kontribusi daerah terhadap pemerintah pusat baik melalui hasil penerimaan pajak maupun hasil SDA pada daerah tersebut. Dana Bagi Hasil (DBH) berperan dalam rangka mendanai pemenuhan belanja daerah. Pemanfaatan DBH yang dilakukan secara optimal akan menghasilkan pemerataan kemampuan keuangan daerah dan mendorong belanja daerah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur serta dapat meningkatkan pelayanan publik. Semakin besar kontribusi DBH yang diberikan terhadap penerimaan daerah maka semakin besar persentase dana yang dibagikan kepada daerah, begitupun sebaliknya. Penelitian oleh Masdjojo dan Sukartono

(2009) menyatakan bahwa DBH berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2006-2008.

H₄: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah suatu kondisi yang menunjukkan perilaku pemerintah dimana lebih besar merespon transfer/grants dari Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) dari pemerintah pusat dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh daerahnya sendiri (PAD) dalam membiayai belanja daerah. *Flypaper effect* sebagai akibat dari perilaku birokrat yang lebih leluasa membelanjakan transfer dari pusat daripada menaikkan penghasilan pajaknya. Purnomo (2011), menunjukkan bahwa telah terjadi *Flypaper Effect* pada kabupaten/Kota di Kalimantan yang berarti telah terjadi inefisiensi belanja daerah yang apabila terjadi secara terus menerus akan berdampak pada rendahnya kemajuan pembangunan ekonomi di daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Armawaddin *et al.* (2017) menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model regresi berganda, terdeteksi adanya gejala *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten dan kota di Sulawesi yang bersumber dari dana bagi hasil pajak (DBHP)/bukan pajak (DBHBP), sedangkan yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) tidak terdeteksi adanya gejala *flypaper effect*.

H₅ : Terjadi *Flypaper Effect* yang ditunjukkan melalui besarnya pengaruh DAU, DAK, DBH terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode dengan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2017:23). Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *full sampling* yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel karena terbatasnya jumlah populasi yang dapat disebut juga sebagai sampel sensus. Menurut Sugiyono (2017:137), sampel sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota.

Teknik Pengambilan Data

Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dokumenter berupa data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu berupa belanja daerah. Sedangkan Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat.

Variabel Dependen

Variabel dependen atau terikat yang terdapat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah. Yang dimaksud dengan Belanja Daerah yaitu berupa angka realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2016 hingga 2018. Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Belanja daerah adalah semua pengeluaran atau kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah itu sendiri yang didasarkan pada kemampuan yang dimiliki dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah dalam membiayai kegiatan daerah yang bersangkutan (UU No. 33 Tahun 2004). Pendapatan yang digunakan adalah PAD yang diterima daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018 dengan satuan rupiah. Pada penelitian ini, pengukuran dalam Pendapatan Asli Daerah didasarkan pada jumlah seluruh sumber penerimaan PAD.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diberikan pemerintah pusat dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pengukuran Dana Alokasi Umum diperoleh dengan melihat dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2016-2018 dengan nominal mata uang rupiah.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan sejumlah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya khusus dalam melaksanakan urusan daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Variabel Dana Alokasi Khusus diperoleh berdasarkan besarnya jumlah yang dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2016-2018 dengan satuan mata uang rupiah.

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan APBN dan cukup potensial yang dialokasikan kepada suatu daerah berdasarkan angka persentase guna mencukupi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil berasal dari Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah komponen dana bagi hasil pajak dan bukan pajak yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun anggaran 2016-2018 dalam satuan rupiah.

Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah sebuah fenomena dimana pemerintah daerah merespon belanja daerah yang lebih banyak berasal dari transfer/grants daripada Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Asumsi penentuan terjadinya *Flypaper Effect* pada penelitian ini berfokus pada perbandingan pengaruh PAD dan dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) terhadap Belanja Daerah.

Syarat terjadinya *flypaper Effect* adalah (a) apabila efek (nilai koefisien) dana transfer DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek (nilai koefisien) PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau (b) PAD tidak signifikan. Ketika pengaruh DAU, DAK, DBH lebih signifikan terhadap Belanja Daerah daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jika difungsikan maka $b_1 > b_2$ berarti $\frac{b_1}{b_2} > 1$ maka kondisi ini disebut sebagai *Flypaper Effect* dan sebaliknya (Maimunah, 2006).

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono (2017:232) menyatakan bahwa statistik deskriptif digunakan untuk menganalisa data penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Ukuran statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi masing-masing variabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, data terdistribusi secara normal atau tidak karena data yang baik adalah data yang telah terdistribusi secara normal. Untuk mengetahui normal atau tidak, dilakukan dengan menggunakan non parametrik *Kolmogorov Smirnov* yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Jika hasil nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut telah terdistribusi secara normal. Sedangkan jika hasil probabilitasnya menunjukkan signifikansi $< 0,05$ maka data residual terdistribusi secara tidak normal (Ghozali, 2005). Selain itu, dalam menguji normalitas residual dapat dilihat melalui analisis grafik dengan cara menganalisis grafik *Normal Probability (P-Plot of Regression, Standardized Residual)* yaitu dapat dilihat pada penyebaran data (titik) yang berada pada sumbu diagonal dari grafik. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola telah terdistribusi secara normal. Ini berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, dan sebaliknya.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas atau independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Untuk mendeteksinya adalah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Gejala multikolinearitas dapat dideteksi jika *Tolerance* $> 0,10$ atau nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 .

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau memiliki varian yang berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghozali (2018:137) menyatakan bahwa cara untuk mendeteksinya dapat dilihat melalui pendekatan grafik plot antara nilai prediksi variabel

dependen (terikat) yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Jika dalam grafik tersebut tidak membentuk pola tertentu yang teratur dan penyebaran data secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Ghozali (2018:111) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan meliputi: (a) angka D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif; (b) angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi; (c) angka D-W di atas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis dengan menggunakan regresi linier berganda digunakan sebagai pengujian untuk menunjukkan arah hubungan antara suatu variabel dependen (terikat) dengan variabel independen (bebas). Analisis regresi linier berganda juga bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan sehingga mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah. Data diolah dengan bantuan berupa aplikasi SPSS dan persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$BD = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAU + \beta_3 DAK + \beta_4 DBH + e$$

Keterangan:

- BD : Belanja Daerah
- α : Konstanta
- β : Slope atau Koefisien Regresi
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- DBH : Dana Bagi Hasil
- e : Standar Error

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh dari variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana nilai R^2 yang kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan jika nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

Uji Signifikansi f

Uji f ini bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Apabila hasil uji f menyatakan nilai signifikan sebesar $< 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat diuji lebih lanjut yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan sebaliknya.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara individual dari variabel independen terhadap variabel dependen. Ghozali (2005) menyatakan bahwa apabila nilai signifikan menyatakan $< 0,05$, maka dapat dikatakan adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Dan sebaliknya, apabila nilai signifikan menyatakan $> 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu. Hal tersebut digunakan dalam menguji hipotesis pertama sampai dengan hipotesis keempat. Sedangkan untuk hipotesis kelima, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara yaitu a) apabila nilai koefisien DAU, DAK, DBH terhadap belanja daerah $>$ nilai koefisien PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau b) PAD tidak signifikan maka terjadi *flypaper effect* (Maimunah, 2006).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menunjukkan gambaran atau deskripsi suatu data yang diolah sehingga dapat mengetahui jumlah data yang diolah, nilai *minimum*, nilai *maximum*, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (*standard deviation*) pada suatu variabel independen dan dependen. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK dan DBH, serta variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Dalam penelitian ini, hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	109	94657	1700795	338829,06	270020,191
DAU	109	378916	1709892	946601,96	307237,121
DAK	109	62162	553022	275398,37	115072,209
DBH	109	43445	909808	113193,48	111045,564
BD	109	713452	4060359	2015087,29	779286,201
Valid N (listwise)	109				

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan jumlah observasi (N) dari penelitian ini sebanyak 109 observasi. Pada variabel PAD menunjukkan bahwa nilai *minimum* Rp. 94.657 juta diperoleh dari Kabupaten Ngawi tahun 2018 dan nilai *maximum* Rp. 1.700.795 dihasilkan oleh Kabupaten Sidoarjo tahun 2018. Nilai *mean* atau rata-rata PAD yaitu sebesar Rp. 338.829,06 Juta dan untuk standar deviasinya (*standard deviation*) sebesar Rp. 270.020,191 Juta. Pada variabel DAU menunjukkan nilai *minimum* sebesar Rp. 378.916 Juta diperoleh dari Kota Mojokerto tahun 2018 dan nilai *maximum* sebesar Rp. 1.709.892 Juta dihasilkan oleh Kabupaten Jember tahun 2016. Nilai rata-rata atau *mean* DAU yaitu sebesar Rp. 946.601,96 Juta dan untuk standar deviasinya (*standard deviation*) sebesar Rp. 307.237,121 Juta. Pada variabel DAK menunjukkan nilai *minimum* sebesar Rp. 62.162 Juta diperoleh dari Kota Mojokerto tahun 2017 dan nilai *maximum* sebesar Rp. 553.022 Juta dihasilkan oleh Kabupaten Malang tahun 2018. Nilai rata-rata atau *mean* DAK sebesar Rp. 275.398,37 Juta dan untuk standar deviasinya (*standard deviation*) sebesar Rp. 115.072,209 Juta. Pada variabel DBH menunjukkan nilai *minimum* sebesar Rp. 43.445 Juta diperoleh dari Kota Batu tahun 2017 dan nilai *maximum* sebesar Rp. 909.808 Juta dihasilkan oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016. Nilai rata-rata atau *mean* DBH yaitu sebesar Rp. 113.193,48 Juta dan untuk standar deviasinya (*standard deviation*) sebesar Rp. 111.045,564 Juta. Pada variabel BD menunjukkan nilai *minimum* sebesar Rp. 713.452 Juta diperoleh dari Kota Mojokerto tahun 2017 dan nilai *maximum* dengan jumlah

sebesar Rp. 4.060.359 Juta dihasilkan oleh Kabupaten Malang pada tahun 2018. Nilai rata-rata atau *mean* BD yaitu sebesar Rp. 2.015.087,29 Juta dan untuk standar deviasinya (*standard deviation*) sebesar Rp. 779.286,201 Juta.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel pengganggu atau residual telah terdistribusi secara normal. Untuk menguji apakah data telah terdistribusi normal atau tidak maka peneliti melakukan uji normalitas data dengan menggunakan 2 cara yaitu:

a. Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test*

Pengujian normalitas yang dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat dari nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila tingkat signifikansi dibawah 0,5, maka data terdistribusi tidak normal begitupun sebaliknya. Berikut hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* disajikan pada Tabel 2 seperti dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

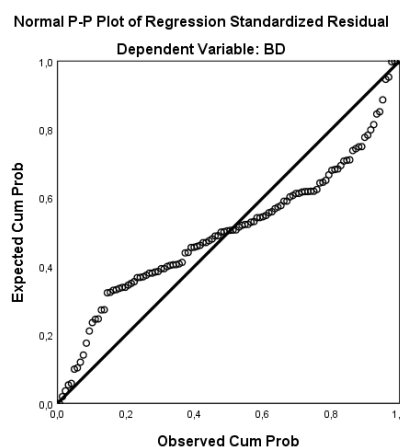
		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	275490,16598319
	Absolute	,180
Most Extreme Differences	Positive	,145
	Negative	-,180
Test Statistic		.180
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 114 data besarnya nilai test statistik *Kolmogorov Smirnov* adalah sebesar 0,180 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,000 yang masih dibawah 0,05 yang berarti bahwa data penelitian berdistribusi tidak normal.

b. Uji Normalitas dengan Analisis Grafik

Uji normalitas dengan analisis grafik yang digunakan adalah grafik *normal probability plot*. Pada grafik ini, jika data menyebar pada garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya. Gambar 2 berikut ini menyajikan hasil grafik P-Plot.



Gambar 2

Grafik Uji Normalitas

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

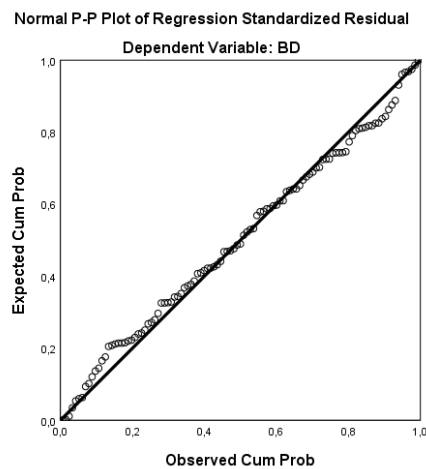
Berdasarkan hasil grafik normal Probability Plot yang disajikan pada gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa titik-titik menyebar jauh dari garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi secara normal dan belum memenuhi asumsi normalitas.

Pada pengujian normalitas dengan analisis statistik dan analisis grafik dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan oleh peneliti tidak terdistribusi secara normal. Untuk mendapatkan data yang memenuhi normalitas data maka peneliti melakukan *screening* data untuk mendeteksi adanya data outlier. Menurut Ghozali (2018:40), *Outlier* merupakan data yang memiliki karakteristik unik yang muncul dengan bentuk nilai ekstrim baik untuk variabel tunggal atau variabel kombinasi. Dalam penelitian ini, pengujian *outlier* dilakukan dengan mengkonversi nilai data penelitian ke dalam *standard score* atau Z-Score. Hasil uji normalitas setelah *screening* data adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		109
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	156246,4441
	Absolute	.072
Most Extreme Differences	Positive	.060
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)



Gambar 3
Grafik Uji Normalitas

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3 dan gambar 3, hasil uji normalitas yang disajikan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan analisis grafik *normal probability plot* setelah dilakukan *outlier* data menunjukkan nilai test statistik adalah sebesar 0,072 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 yang berarti data telah terdistribusi secara normal. Selain itu, penyebaran titik-titik mengikuti arah garis diagonal dan berada sangat dekat dengan garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas dan terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melakukan pengujian apakah dalam model regresi yang digunakan terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (independen). Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat apabila nilai *Tolerance* > 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	PAD	.739	1.353	Bebas Multikolonieritas
	DAU	.180	5.551	Bebas Multikolonieritas
	DAK	.190	5.252	Bebas Multikolonieritas
	DBH	.869	1.151	Bebas Multikolonieritas

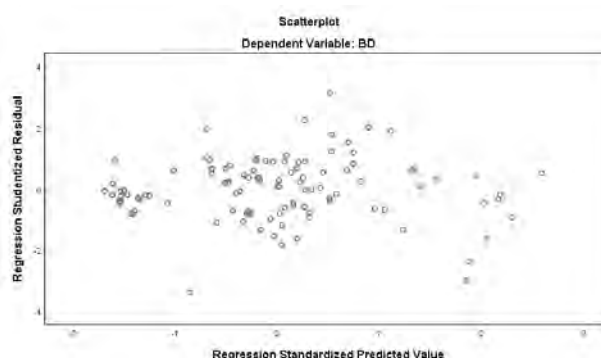
a. Dependent Variable: BD

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Pada Tabel 4 diatas diperoleh hasil bahwa variabel independen PAD, DAU, DAK, dan DBH memiliki nilai *Tolerance* lebih dari 0,10 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) memiliki nilai kurang dari 10. Dengan demikian, disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas atau independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varians atau memiliki varian yang berbeda dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dapat menggunakan metode grafik plot antara nilai prediksi variabel independen ZPRED dengan residualnya SRESID. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dengan grafik *Scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 4
Grafik Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan gambar 4 diatas dapat dilihat melalui grafik *Scatterplot* yaitu tidak membentuk pola yang teratur dan jelas serta titik-titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi autokorelasi pada model regresi dapat dilihat pada uji Durbin-Watson. Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.980 ^a	.960	.958	159222.834	1.879

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5 diatas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson yang dihasilkan yaitu sebesar 1,879. Dengan asumsi ketentuan diatas, nilai D-W yang dihasilkan antara -2 sampai +2 maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Pada penelitian ini nilai D-W adalah $-2 < 1,879 < 2$ sehingga pada model regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menunjukkan arah dan mengukur kekuatan hubungan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-935404.462	51431.851		-1.819	.072
PAD	.996	.066	.345	15.096	.000
DAU	1.301	.117	.513	11.071	.000
DAK	1.259	.305	.186	4.126	.000
DBH	1.706	.148	.243	11.526	.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 6 diatas maka diperoleh model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$BD = -935404,462 + 0,996PAD + 1,302DAU + 1,259DAK + 1,706DBH + \varepsilon$$

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi koefisien determinasinya maka semakin tinggi kemampuan variabel independen dapat menjelaskan varian perubahan pada variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R²) pada penelitian disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.980 ^a	.960	.958	159222.834	1.879

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BD

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Pada Tabel 7 disajikan hasil uji koefisien determinasi atau R Square yaitu sebesar 0,960 atau sebesar 96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH dapat menjelaskan dan memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependen yaitu BD. Sedangkan 4% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

Uji Signifikansi f

Uji f dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel independen pada penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau digunakan untuk mengetahui apakah model regresi layak digunakan atau tidak. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka model regresi layak digunakan dalam penelitian. Hasil uji f penelitian ini disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Signifikansi f
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.295E+13	4	1.574E+13	620.766	.000 ^b
	Residual	2.637E+12	104	2.535E+10		
	Total	6.559E+13	108			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Pada Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah sebesar 620,766 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti hasil uji f telah signifikan. Dengan demikian, disimpulkan bahwa model pada penelitian ini telah layak untuk digunakan.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara individual variabel independen terhadap variabel dependen secara signifikan. Hasil uji statistik t disajikan pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-935404.462	51431.851		-1.819	.072
PAD	.996	.066	.345	15.096	.000
DAU	1.301	.117	.513	11.071	.000
DAK	1.259	.305	.186	4.126	.000
DBH	1.706	.148	.243	11.526	.000

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki t_{hitung} sebesar 15,096 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki t_{hitung} sebesar 11,071 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki t_{hitung} sebesar 4,126 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil memiliki t_{hitung} sebesar 11,526 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Daerah sehingga hipotesis keempat dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki nilai koefisien yaitu sebesar 0,996 lebih rendah dibandingkan dengan nilai koefisien DAU sebesar 1,301, DAK sebesar 1,259 dan DBH sebesar 1,706. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2018 baik yang berasal dari DAU, DAK maupun DBH. Dengan demikian, maka hipotesis kelima dinyatakan diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar 0,996 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Artinya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah dimana semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula Belanja Daerahnya. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor penunjang utama dalam merealisasikan perkembangan dan pembangunan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Selain itu, kenaikan Pendapatan Asli Daerah disertai dengan kenaikan Belanja Daerah juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan pajak dan retribusi daerah telah dikembalikan kepada rakyat dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, peningkatan infrastruktur dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat membiayai daerah dan meningkatkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2010) dan Astriati (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar 1,301 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Meningkatnya Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Daerah dikarenakan DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan bentuk *block grants* yang berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaannya karena tidak terikat dalam kriteria tertentu (Intani, 2018). Dana Alokasi Umum bersifat *unconditional grants* (transfer tak bersyarat) yang diberikan pemerintah pusat dengan bertujuan untuk meratakan kemampuan

keuangan antar daerah agar tidak terjadi ketimpangan fiskal dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Suatu daerah dapat dikatakan telah mandiri apabila Dana Alokasi Umum yang diterima semakin kecil karena sudah tidak bergantung pada pemerintah pusat dan sebaliknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia (2014) dan Liando (2017) yang memberikan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar 1,259 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Khusus maka akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Daerah. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus merupakan dana dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah khusus dengan berdasarkan pada kriteria tertentu sesuai dengan prioritas nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada daerah-daerah tertentu diperuntukkan untuk menutup kesenjangan dalam pelayanan publik dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perikanan dan kelautan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup (Handayani dan Nuraini, 2012). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asriati (2017) dan Armawaddin *et al.* (2017) memberikan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar 1,706 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Kondisi ini memperlihatkan Dana Bagi Hasil yang meningkat maka akan meningkatkan Belanja Daerah pula. Hal ini dikarenakan, Dana Bagi Hasil merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial dan dapat dijadikan sebagai tambahan modal dalam memenuhi belanja daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan publik. Besarnya jumlah DBH dapat dikatakan bahwa kontribusi yang diberikan oleh daerah juga besar sehingga jumlah dari persentase pembagian DBH juga tinggi. Dengan besarnya DBH yang diberikan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan fiskal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) dan Sasana (2010) yang membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Flypaper Effect Terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil uji analisis yang dilakukan maka dapat diketahui telah terjadi *flypaper effect* pada Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018 yang dinyatakan dengan efek nilai koefisien DAU, DAK, dan DBH > nilai koefisien PAD dan keduanya sama-sama signifikan. Hasil pengujian memperlihatkan nilai koefisien DAU sebesar 1,301, DAK sebesar 1,259, dan DBH sebesar 1,706 sehingga ketiga variabel tersebut memiliki nilai koefisien lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien PAD yang hanya sebesar 0,996. Dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah transfer yang diberikan pemerintah pusat yang bersumber dari dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) akan meningkatkan jumlah Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. Ini membuktikan bahwa *flypaper effect* telah terjadi yang berarti tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang provinsi atau kabupaten/kota. Sedangkan pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang dapat dipergunakan dalam membiayai kebutuhan daerah. Terjadinya *flypaper effect* yang bersumber dari DAU disebabkan karena DAU merupakan transfer tak bersyarat sehingga pemerintah daerah cenderung untuk menanti bantuan dana yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas pelaksanaan desentralisasi. Pada penelitian ini, menunjukkan juga terjadi *flypaper effect* pada transfer bersyarat yaitu DAK. Hal ini dikarenakan pengalokasian DAK diberikan dengan bertujuan khusus yang telah diprogramkan sesuai dengan prioritas nasional dan diberikan pada daerah yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan *flypaper effect* yang terjadi pada DBH ini dikarenakan DBH termasuk dalam transfer tak bersyarat. Pemerintah daerah merespon belanja lebih besar dari dana pemerintah pusat berupa DBH daripada pendapatan asli daerah. Sehingga pemerintah daerah mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat daripada harus berusaha menggali sumber-sumber potensi pendapatan yang dimiliki daerah masing-masing.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD akan mempengaruhi peningkatan Belanja Daerah tersebut dan sebaliknya, jika Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan maka akan menurunkan Belanja Daerah. Dengan melihat PAD maka dapat diketahui tingkat kemandirian suatu daerah dimana semakin tinggi PAD maka semakin memungkinkan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya tanpa harus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. 2) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU yang diperoleh, maka semakin tinggi pula Belanja Daerah yang dikeluarkan dan sebaliknya. Besarnya jumlah DAU yang diberikan dapat menggambarkan bahwa suatu daerah belum mandiri dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Semakin rendah jumlah Dana Alokasi Umum yang dialokasikan maka dapat dikatakan suatu daerah telah mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat dan sebaliknya. 3) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hal ini berarti semakin meningkatnya jumlah DAK yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin meningkat pula Belanja Daerah. Dana yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus tidak boleh disalahgunakan atau digunakan diluar ketentuan. 4) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Hasil ini menunjukkan, jika DBH meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat, begitupun sebaliknya. Semakin tinggi DBH yang diperoleh daerah dapat mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah juga baik karena tingginya kontribusi daerah dalam hal pajak dan sumber daya alam yang akan dibagi dihasilkan oleh pemerintah pusat. 5) Hasil pengujian memperlihatkan terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018. Hasil tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien DAU, DAK dan DBH lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien PAD. Sehingga dana transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk DAU, DAK, DBH masih mendominasi kebijakan belanja daerah daripada PAD yang dihasilkan. Kondisi ini menunjukkan ditemukannya *flypaper effect*.

Saran

Penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu jumlah sampel yang diteliti hanya terbatas pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan data yang diteliti selama 3 tahun yaitu tahun 2016-2018 dan variabel independen yang diteliti hanya terbatas pada Dana Perimbangan yaitu

Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil dan data yang digunakan hanya laporan realisasi anggaran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran atas hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut: 1) Bagi pemerintah, diharapkan dapat mengelola lebih dalam lagi potensi-potensi ekonomi lokalnya untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu juga menggali potensi-potensi daerah untuk menambah penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sehingga kemandirian daerah terwujud untuk membiayai belanja daerah melalui PADnya dan ketergantungan pada pemerintah pusat dapat berkurang. Serta kesejahteraan penduduk dan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat dapat terpenuhi. 2) Penelitian berikutnya diharapkan untuk menggunakan penelitian dengan pendekatan lain dan mengkaji lebih dalam dengan kuisisioner dan wawancara sehingga dapat menggambarkan perilaku aparatur dan menjelaskan penyebab terjadi *flypaper effect*. Serta cakupan objek penelitian yang lebih luas dan menggunakan data dengan rentang waktu lebih dari tiga tahun agar kesimpulan yang dihasilkan memiliki cakupan yang lebih luas. 3) Bagi masyarakat, instansi maupun wajib pajak lainnya diharapkan untuk memiliki kesadaran diri dalam membayar pajak secara tepat waktu dengan tidak melampaui batas pembayaran sehingga daerah dapat memperoleh dana yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah guna mengurangi ketergantungan daerah dan membiayai pembangunan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibowo, T. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*. 11(Edition Khusus Desember 2015): 335-344.
- Armawaddin, M., W. A. Rumbia, dan M. N. Afiat. 2017. Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/kota di Sulawesi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 18(1): 77-91.
- Asriati, D. 2017. Flypaper Effect pada DAU DAK dan PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi* 6(10): 1-20.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Pertama. PT Indeks. Jakarta.
- Ekawarna, S. U. 2017. Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pamekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 4(3): 167-184.
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- _____. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Kesembilan. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Hamdani, S. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman. https://www.academia.edu/10095917/PENGARUH_DANA_ALOKASI_UMUM_DAU_DAN_PENDAPATAN_ASLI_DAERAH_PAD_TERHADAP_BELANJA_DAERAH_PADA_KABUPATEN_KOTA_DI_PROVINSI_KALIMANTAN_TIMUR. Diakses Tanggal 28 Oktober 2019.
- Handayani, D. dan E. Nuraina. 2012. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 1(1): 1-12.
- Intani, R. 2018. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

- Liando, I. E. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Flypaper Effect dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah Padang. Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Masdjoko, G. A. dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Telaah Manajemen* 6(Edisi 1): 32-50.
- Oktavia, D. 2014. Flypaper Effect: Fenomena Serial Waktu dan Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur 2003-2013. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 12(2): 1-16.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 12 Maret 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* 15 Mei 2006. Jakarta.
- Purnomo, H. B. 2011. Flypaper Effect pada Transfer Tidak bersyarat dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan tahun 2007-2010. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/pustaka_unpad_flypaper_effect_pada_pengaruh_transfer.pdf. Diakses Tanggal 24 Oktober 2019.
- Raharjo, E. 2007. Teori Sgensi dan Teori Stewarship dalam Persepektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi* 2(1).
- Ramadhan, P. N. 2018. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Purwokerto.
- Sari, E. T. 1. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sasana, H. 2010. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia. *EKO-REGIONAL* 5(2): 61-66.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Yani, A. 2002. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.